KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:7839-7471-8449-2704

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.03.2.693029/2026

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(135)	KEMENTERIAN HUKUM
2. Unit Organisasi	:	(03)	DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
3. Provinsi	:	(19)	SULAWESI SELATAN
4. Kode/Nama Satker	:	(693029)	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN
Sebesar	:	Rp. 436.600.000	(EMPAT RATUS TIGA PULUH ENAM JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03	PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :			Jumlah Uang
135.03.BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	436.600.000
135.03.BB.	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp.	436.600.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	436.600.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN MAKASSAR II (136) Rp. 436.600.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693029/2026
I A. INFORMASI KINERJA

DS:7839-7471-8449-2704

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode/Nama Satker : (693029) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN

Program	:	135.03.BB	Program Pembentukan Regulasi			436.600.000
Kegiatan	:	7129	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah			436.600.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Perencanaan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum			
		2. 02	Persentase Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7129.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	250,00	Rekomendasi Kebijakan	383.207.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Kebijakan Hasil Harmonisasi Produk Hukum Daerah	250.00	Rekomendasi Kebijakan	383.207.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7129.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1,00	Lembaga	30.120.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Daerah	1.00	Lembaga	30.120.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	7129.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00	Laporan, Layanan	23.273.000
Rincian Output	:	01 FAE.X01	Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah	1.00	Laporan	23.273.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.

Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693029/2026

DS:7839-7471-8449-2704

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga	: (135)	KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi	: (03)	DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi	: (19)	SULAWESI SELATAN
Kode/Nama Satker	: (693029)	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN

								Pagu		Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	436.600.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	436.600.000			(2) RPLN	US$	0	Rp.	0
2. PNBP	Rp.			b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0			(2) RHLN	US$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri		IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693029/2026

DS:7839-7471-8449-2704

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode/Nama Satker : (693029) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693029	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN**	**-**	**436.600**	**-**	**-**	**-**	**436.600**		
135.03.BB	**Program Pembentukan Regulasi**	**-**	**436.600**	**-**	**-**	**-**	**436.600**		
7129	**Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah**	**-**	**436.600**	**-**	**-**	**-**	**436.600**		
7129.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	-	383.207	-	-	-	383.207	19 . 51	
	(19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)								
01	RM	-	383.207	-	-	-	383.207	136	
7129.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	-	30.120	-	-	-	30.120	19 . 51	
	(19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)								
01	RM	-	30.120	-	-	-	30.120	136	
7129.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	-	23.273	-	-	-	23.273	19 . 51	
	(19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)								
01	RM	-	23.273	-	-	-	23.273	136	
	JUMLAH	**-**	**436.600**	**-**	**-**	**-**	**436.600**		

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.

Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693029/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:7839-7471-8449-2704

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode/Nama Satker : (693029) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**693029**	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	10.120	57.460	17.980	36.140	44.400	56.609	39.510	50.866	62.140	35.290	26.085	0	436.600
		BELANJA BARANG	10.120	57.460	17.980	36.140	44.400	56.609	39.510	50.866	62.140	35.290	26.085	0	436.600
	135.03.BB.7129	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	10.120	57.460	17.980	36.140	44.400	56.609	39.510	50.866	62.140	35.290	26.085	0	436.600
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	10.120	57.460	17.980	36.140	44.400	56.609	39.510	50.866	62.140	35.290	26.085	0	436.600

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693029/2026
IV A. B L O K I R

DS:7839-7471-8449-2704

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : [19] SULAWESI SELATAN
Kode dan Nama Satker : [693029] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693029/2026
IV B. C A T A T A N

DS:7839-7471-8449-2704

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : [19] SULAWESI SELATAN
Kode dan Nama Satker : [693029] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001